

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hayati, Tri, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan, Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- H.S. Salim , 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S, Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- H.S, Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan, 2003, *Seri Hukum Harta Kekayaan:Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Sajipto, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Setiawan, I Ketut Oka 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjsschun, 1976, *Hukum Perdata Hukum Benda, Seksi Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, _____, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Subekti dan R.Tjiptosudibio, 2004, *Kita Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Paramita, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.

- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Triwulan T, Titik dan Ismu Gunawan Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1981 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Warta Perundang-Undangan tahun 1996 Nomor 1578).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 478).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1143).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2050).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 256 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2054).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2160).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 267).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 746, 2014)

B. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Abrar Saleng, “Hubungan Hukum Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Berbagai Kontrak Kerjasama Pengusahaan Pertambangan”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.13 April 2000.

Abrar Saleng, “Kepastian Hukum dan Status Hukum Pemerintah Dalam Kontrak Karya Pertambangan”, *Mimbar Hukum*, Volume X, Nomor 36 2000.

Arsadt, “Eksistensi Asas *Pacta Sunt Servanda* Atas Perubahan Undang-Undang (Kajian Mengenai Kontrak Karya Pertambangan PT. Freeport)”, *Tesis*, UGM, Yogyakarta, 2017.

Rudi Krisyantho L K, “Keberadaan Asas Itikad Baik Dalam Rezim Hukum Perjanjian (Kontrak Karya) Atas Berlakunya Rezim Hukum Izin (Izin Usaha Pertambangan Khusus) (Suatu Kajian Dalam Kasus PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia)”, *Tesis*, UGM, Yogyakarta, 2017.

Wasito, “Analisis Yuridis Penyerahan Kepemilikan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi dan Penyajian dan Pengungkapannya Dalam Neraca Pemerintah Republik Indonesia”, *Tesis*, UGM, Yogyakarta, 2015.

Siti Nurhidayati, “Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik daerah dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Neraca Daerah Di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, UGM, Yogyakarta, 2017.

C. Internet

“These Are The World’s Biggest Coal Producers”, <https://www.weforum.org/agenda/2018/01/these-are-the-worlds-biggest-coal-producers/> diakses pada tanggal 1 Maret 2018.

D. Sumber Lainnya

- Amandemen Kedua Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara No. J2/Ji.DU/52/82 Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT Adaro Indonesia Tanggal 17 Januari 2018
- Amandemen Kedua Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2./Ji.DU/46/81 Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT Kendilo Coal Indonesia Tanggal 17 Januari 2018.
- Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT Antang Gunung Meratus Tanggal 5 Agustus 2015.
- Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara No.J2/Ji.DU/52/82 Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT Adaro Indonesia, Tanggal 16 November 1982.
- Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara No.014/PK/PTBA-AGM/1994 Antara PT Tambang Batuara Bukit Asam (Persero) dan PT Antang Gunung Meratus tanggal 15 Agustus 1994.
- Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT Insani Baraperkasa Tanggal 20 November 1997.
- Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016
- Notulen Rapat Pembahasan Mekanisme Pemakaian BMN Yang Berasal Dari PKP2B Generasi I Yang Akan Menjadi IUPK , diselenggarakan pada tanggal 28 s.d 29 Maret 2018 di Bandung.
- Paparan “Perubahan PKP2B G I Menjadi IUPK”, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Mei 2017.
- Paparan “Perubahan PKP2B Menjadi IUPK” oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam Rapat Pembahasan Perpanjangan PKP2B Generasi I Menjadi IUPK yang diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2018 di Gedung A Ditjen Mineral dan Batubara.
- Surat Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Nomor S-602/KN.4/2016 Tanggal 26 September 2016.
- Surat Direktur Pembinaan Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor 378/30DBB.BU/2018 Tanggal 15 Maret 2018.
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-138/MK.6/2018 Tanggal 23 Maret 2018.

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 392/95/SDB/2017 Tanggal 22 Februari 2017.

Surat usulan PT Tanito Harum Nomor 015/TH/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.

Surat usulan PT Kaltim Prima Coal Nomor L063/BOD MDI.7.5/II/18 tanggal 13 Februari 2018